

(Draft Makalah tidak untuk dikutip)

MEMPERKUAT DUKUNGAN MASYARAKAT BAGI SEKOLAH¹ **(Suatu Sumbangan Pemikiran dalam Memahami Otonomi Pendidikan)**

Achmad Fedyani Saifuddin
(Universitas Indonesia)

A PENDAHULUAN

Transmisi pengetahuan dalam suatu masyarakat atau kelompok seringkali dilihat dalam perspektif sistem, di mana setiap peristiwa transmisi dikondisikan, baik secara potensial maupun faktual, oleh unsur-unsur dalam sistem. Itulah sebabnya, misalnya, “garis” kehidupan seorang buruh pabrik atau petani kecil tak akan pernah bertemu dengan “garis” kehidupan keluarga kaya raya. Namun, secara tidak langsung peristiwa-peristiwa dalam sistem tetap ada kaitannya, karena setiap peristiwa adalah bagian dari konteks sosialbudaya yang lain. Banyak pengetahuan yang ditransmisikan dalam setiap kelompok bersifat tersirat dalam struktur hubungan yang ada.

Dalam ruang lingkup paling luas, pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan secara sistematis tidak dapat difahami terpisah dari transmisi total sosialisasi /enkulturasi.

Memusatkan perhatian pada pendidikan berarti memusatkan perhatian, setidaknya sebagian, pada peristiwa-peristiwa penyampaian (transfer) pengetahuan dari seseorang/kelompok kepada orang/kelompok lain. Proses ini kompleks dalam suatu masyarakat, karena begitu beragam lembaga pendidikan, mode komunikasi, tujuan, dan mode organisasi yang terlibat.

Untuk menganalisa pendidikan sebagai sistem sosialbudaya kita membutuhkan pemetaan distribusi sosial pengetahuan dan nilai-nilai yang terkait. Selain itu kita juga perlu mengidentifikasi semua tipe transaksi pendidikan dan konteks yang terjadi dalam masyarakat, agar dapat memahami hubungannya satu sama lain.

Dalam menanggapi pendidikan, kita dipengaruhi dan dibentuk oleh suatu cara berfikir tertentu. Sudut pandang terhadap pendidikan yang konsep-konsepnya telah tersusun sedemikian sebagai sebuah sistem dapat dianggap sebagai sebuah perspektif; dan kerap kali terjadi, apabila perspektif tersebut telah disebarkan secara luas (well publicized) dan memperoleh penerimaan yang baik dari banyak orang, ia dapat digunakan sebagai acuan bertindak dalam lapangan pendidikan. Perspektif tersebut telah berfungsi sebagai acuan (landasan) dalam membangun kebijakan pendidikan nasional.

¹ Makalah disampaikan pada Simposium Jurnal *Antropologi Indonesia II* “Globalisasi dan Kebudayaan Lokal: Suatu Dialektika Menuju Indonesia Baru”, Universitas Andalas, Padang, 18-21 Juli 2001.

B. Dua Orientasi Perspektif

Ada anekaragam cara pandang dalam melihat pendidikan, dan termasuk di dalamnya cara pandang sosial budaya. Perspektif sosialbudaya yang berasal dari disiplin antropologi ini masih belum banyak dikenal di Indonesia, khususnya dalam bidang kajian pendidikan. Paradigma sosialbudaya ini tercermin dari pernyataan di atas, bahwasanya “pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan *secara sistematis* tidak dapat difahami *terpisah* dari total sosialisasi/enkulturasi”. Dua kata kunci dalam pernyataan ini, yakni *sistematis* dan *tak terpisah*, memberikan indikasi yang tegas bahwa perspektif ini mementingkan analisa seperangkat unsur yang saling tergantung satu sama lain secara totalistik sebagai sebuah sistem.

Secara evolusioner, saya membagi pengertian perspektif sistemik ini menjadi dua tahap, yakni perspektif struktural-fungsionalisme, dan prosesual. Pergeseran perspektif dari tahap pertama ke tahap kedua sesungguhnya merupakan representasi kenyataan dalam masyarakat, yakni bagaimana orang mengkonsepsikan dan mewujudkan perilaku pembelajaran dalam masyarakat dari masa ke masa. Dalam sejarah pendidikan kita, pendidikan dilihat sebagai sistem yang didominasi oleh pemikiran Eropah pada abad 18 dan 19 yang kemudian diwarisi oleh tradisi pendidikan kolonial Hindia Belanda dan pendidikan nasional kita masa kini. Sistem pendidikan ini merupakan cerminan cara berfikir yang saya sebut pertama, yakni berfikir struktural-fungsional. Perubahan cara berfikir mengenai pendidikan, di mana manusia ditanggapi sebagai subjek yang aktif menentukan “nasib” sendiri, mengembangkan perspektif prosesual yang mulai banyak mempengaruhi paradigma sosialbudaya pendidikan pada akhir abad 20 yang lalu hingga kini. Baiklah kita diskusikan secara singkat kedua perspektif tersebut.

Perspektif Struktural-fungsionalisme

Cara pandang struktural fungsionalisme menempatkan pendidikan dalam tatanan linear sebagai salah satu komponen dari sebuah sistem yang lebih besar. Andaikata suatu sistem terdiri dari sepuluh komponen, maka pendidikan mengambil porsi sepersepuluh dari sistem tersebut, yang tergantung pada keberadaan dan fungsi dari sembilan per sepuluh komponen lainnya. Pandangan holistik semacam ini menjadikan pendidikan sebagai sebagian kecil yang tergantung pada, dan kerap kali didominasi oleh, sebagian besar komponen sistem yang lain.

Kecenderungan berfikir struktural-fungsionalisme pada tingkat nasional mendorong penyusunan kebijakan dan pengambil keputusan pendidikan nasional untuk berfikir seragam; artinya, ada suatu kekuatan -- yakni kekuasaan negara -- yang berfungsi sentral untuk merancang *blue-print*, menyusun kurikulum, mempersiapkan tenaga pengajar, dan menyediakan fasilitas pendidikan untuk semua bagian dan tingkatan pendidikan di seluruh negeri. Sebagai hasilnya adalah sebuah sistem yang stabil, seimbang, dan “anti” perubahan.

Premis dari struktural-fungsionalisme meliputi: (a) masyarakat adalah sebuah sistem yang bekerja; (b) sistem yang bekerja menuntut institusi-institusi

komponennya memberikan kontribusi demi dipeliharanya sistem tersebut; (c) sistem sosial yang bekerja menuntut semua anggota sistem untuk dimotivasi dan dilatih untuk memfasilitasi fungsi sistem.

Apabila kita menengok sejenak kebijakan nasional pendidikan kita, barangkali kita sertamerta sadar bahwa selama ini pendidikan kita dirancang menurut premis pemikiran di atas. Kelebihan cara berfikir ini adalah transmisi pengetahuan yang seragam dan merata di seluruh Indonesia, baik kurikulum, latarbelakang dan kualifikasi pengajar, metode belajar-mengajar, maupun buku-buku ajar yang digunakan, sehingga dalam jangka panjang kesatuan nasional melalui proses pendidikan dapat terjaga. Fakta menunjukkan bahwa proyek-proyek nasional pendidikan, khususnya proyek pengembangan fasilitas, menghasilkan kumpulan bangunan sekolah yang seragam di seluruh Indonesia. Kekurangan cara berfikir ini adalah penafian kenyataan keanekaragaman tipe sosialbudaya yang sesungguhnya potensial untuk pengembangan kesejahteraan setempat.

Perspektif Prosesual

Perspektif prosesual merupakan respon teoritis terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Seperti halnya perspektif struktural-fungsionalisme mengenai pendidikan, pemikiran prosesual juga memandang pendidikan sebagai sistem. Perbedaannya adalah bahwa perspektif ini menempatkan manusia sebagai sentral, sebagai makhluk subjektif yang aktif, proaktif, manipulatif, dan mampu mengembangkan strategi-strategi untuk menghadapi, dan bahkan mengubah lingkungan di mana ia berada; berbeda dari pandangan struktural fungsionalisme yang melihat manusia lebih sebagai objek yang menjadikan lingkungan sebagai pedoman bagi bertindak. Menghadapi perubahan, perspektif struktural fungsionalisme lebih suka menggunakan konsep *adaptasi* ketimbang konsep *modifikasi* dan *manipulasi* simbolik, karena adaptasi mengandung makna “menyerap perubahan-perubahan secara gradual agar makhluk hidup tetap mampu mempertahankan diri di dalam sistem”.

Cara berfikir prosesual menempatkan faktor interaksi sebagai unsur penting. Dalam interaksi tersebut manusia mengerahkan segala daya upaya agar bentuk dan kualitas kehidupan berubah menjadi lebih baik. Kerap kali terjadi bahwa manusia berhasil mengubah gurun pasir yang tandus, atau hutan belantara yang garang, menjadi lingkungan kehidupan yang nyaman. Akan tetapi, cukup banyak pula kasus yang menunjukkan bahwa manusia menyesuaikan diri dengan tatanan lingkungan yang sudah ada. Kedua contoh ini menunjukkan adanya dinamika manusia sebagai makhluk yang aktif. Konsep adaptasi yang secara eksplisit mencerminkan adanya batas-batas lingkungan yang tegas di satu pihak bergeser kepada konsep modifikasi dan manipulasi dengan batas-batas sistem lingkungan yang tidak tegas.

C Dari Struktural-Fungsionalisme ke Proses

Kebijakan otonomi pendidikan, sebagai bagian dari kebijakan otonomi daerah yang baru saja diterapkan diperkirakan akan menimbulkan dampak yang tak semudah mengubah-paradigma teoritis di atas kertas. Perubahan orientasi pendidikan dalam perspektif sosialbudaya membutuhkan satu atau dua generasi agar terwujud secara signifikan.

Perubahan paradigma pendidikan menuntut kesiapan kita untuk berubah dari satu ekstrim ke ekstrim yang lain; secara teoritis mungkin dapat dipandang sebagai perubahan cara pandang dari struktural-fungsionalisme ke cara pandang ekologi sosialbudaya atau prosesual interaksionisme dalam mengatur dan mengelola pendidikan kita.

Dengan menempatkan pendidikan (secara spesifik, sekolah) sebagai sentral, kita mengidentifikasi persoalan-persoalan dan membangun mode eksplanasinya dengan melihat interaksi pendidikan dengan komponen-komponen (sistem) di lingkungannya dalam konteks dinamik. Berbeda dari pendekatan sistemik fungsional, pendekatan prosesual ini lebih menekankan kreatifitas aktor sehingga terhindar dari ciri-ciri pasif, stabil, dan selalu memelihara mekanisme sistem.

D Sistem pendidikan kita yang seragam dan berorientasi ke atas

Dalam sejarah pendidikan di Indonesia, khususnya pendidikan tingkat menengah, satu pendekatan yang memperhatikan keterkaitan (*linkage*) antara sekolah dan masyarakat belum dikenal dengan baik. Institusi pendidikan formal yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah suatu satuan yang berdiri sendiri, yang terpisah dari masyarakat di mana ia berada. Institusi ini bekerja menurut kebijakan pemerintah yang seragam secara nasional mulai dari merencanakan program pendidikan hingga menghasilkan lulusan tanpa memperhatikan keterkaitan dengan kebutuhan riil masyarakat -- yakni, apakah dan seberapa jauh tipe lulusan yang dihasilkan oleh sekolah menengah berfungsi memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan kata lain, sekolah dan masyarakat tidak dipandang sebagai bagian dari satu sistem yang komponen-komponennya saling tergantung satu sama lain.

Sistem pendidikan seragam yang berlaku di Indonesia mengandung fungsi positif apabila dilihat dari segi membangun kesatuan nasional melalui proses pendidikan. Kurikulum nasional yang dibangun menitikberatkan pada kesamaan-kesamaan baik dari segi sistem kurikulum, bahan ajar, perangkat fisik, maupun sistem penyediaan guru di seluruh Indonesia. Sebagai contoh, sistem kurikulum dan pengajaran di IKIP-IKIP di seluruh tanah air hanya satu jenis, dan menghasilkan tenaga guru yang berkualifikasi sarjana yang sama pula. Sistem ini memudahkan dalam melakukan akreditasi institusi pendidikan yang mencetak guru (IKIP) karena berlaku secara nasional, akan tetapi tidak memberikan peluang bagi berkembangnya variasi, padahal variasi dalam kondisi sosialbudaya khususnya, sangat menonjol dalam kenyataan.

Selain itu, sistem pendidikan seragam dan sentralistis ini juga tercermin dari terpusatnya penyediaan buku ajar. Semua sekolah di seluruh Indonesia menggunakan bahan ajar yang sama baik bagi siswa maupun bahan pegangan bagi guru. Sebagai evaluasi akhir, diterapkan sistem pengujian nasional yang juga ditentukan dari Jakarta, yang disebut

Ebtanas. Dari hasil Ebtanas itulah diperingkat secara kuantitatif semua sekolah di seluruh tanah air, dari yang “terbaik” hingga yang “terburuk” tanpa memperhatikan kondisi-kondisi spesifik dan lokal yang mempengaruhi (bahkan menentukan) taraf pencapaian suatu sekolah.

E. Otonomi Pendidikan

Perubahan politik yang terjadi sekitar dua tahun yang lalu membawa dampak terhadap sistem pengelolaan pemerintahan. UU No.22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah jelas menunjukkan bahwa sebagian (besar) pengelolaan pemerintahan dialihkan dari Pusat ke Daerah tingkat I dan II. Sebagai salah satu unsur pemerintahan pengelolaan pendidikan juga diserahkan ke daerah, sedangkan pemerintah Pusat bertindak sebagai fasilitator saja. Sebagai akibat kebijakan baru ini, maka daerah dituntut untuk lebih aktif dan proaktif untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab mempersiapkan dan menyelenggarakan pendidikan baik dari segi kurikulum maupun pengajar, fasilitas, dan dana yang cukup.

Sekolah sebagai penyelenggara pendidikan adalah unsur terkena dampak besar dari perubahan yang terjadi. Pihak sekolah dituntut untuk aktif mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri, hambatan-hambatan yang dihadapi, dan potensi-potensi prospektif yang dimiliki. Pada masa mendatang, sekolah bahkan dituntut untuk aktif memformulasikan visi dan misi mereka sendiri yang berorientasi lokal dan regional. Secara lambat laun peran dan campur tangan pemerintah akan dikurangi.

F. Pendidikan kita sebagai suatu proses budaya

Secara umum memandang pendidikan dalam perspektif sosialbudaya belum banyak diketahui, meski banyak diucapkan orang secara retorik. Cara memandang pendidikan dengan perspektif ini sangat penting diperkenalkan dan dibicarakan karena relevansinya yang sangat besar dengan perubahan paradigma pendidikan yang tengah berlangsung.

Memandang pendidikan (di sekolah) sebagai kebudayaan berarti melihat pendidikan sebagai proses transmisi pengetahuan secara formal dan berkesinambungan, yang terjadi di antara pihak-pihak yang terlibat (dalam konteks sekolah, antara guru-guru, murid-murid, dan administratur) menurut perangkat-perangkat aturan yang baku. Pengetahuan yang diperoleh tersebut akan digunakan dalam mewujudkan perilaku bagi menghadapi lingkungan.

Nampaknya cukup jelas bahwa kebijakan pendidikan di Indonesia selama kurang-lebih 50 tahun merdeka didominasi oleh cara berfikir struktural-fungsionalisme. Akibatnya, ketika perubahan besar terjadi di dunia sekarang ini, khususnya ketika manusia mulai disadarkan bahwa mereka adalah subjek atau aktor yang aktif dan menentukan nasib sendiri, kesadaran akan pendidikan sebagai proses yang terikat dengan berkembangnya gagasan demokrasi ini pun melanda dunia, termasuk juga Indonesia.

Meningkatnya kesadaran antroposentrik ini membangkitkan perlunya manusia mengenal kebutuhan dan potensinya sendiri. Kebijakan otonomi daerah, termasuk otonomi

pendidikan, merupakan respons terhadap gagasan demokrasi tersebut. Dengan kata lain, telah terjadi pergeseran yang signifikan dari filosofis berfikir struktural-fungsionalisme ke cara berfikir proses yang anti-statis. Implikasi terhadap konsep kebudayaan adalah bahwa kebudayaan tidak lagi merupakan *black box* yang berisikan pengetahuan, keyakinan, aturan-aturan yang menjadi semacam pedoman baku bagi mewujudkan perilaku orang-orang yang "memiliki" kebudayaan yang bersangkutan, melainkan secara aktif mereka mengevaluasi relevansi pengetahuan, keyakinan, dan aturan-aturan yang ada, merevisi atau bahkan merombak yang dipandang tidak relevan dan membangun yang baru. Sebagai subjek, manusia merupakan pelantar perubahan (*agent of change*) yang selalu berinisiatif dan cenderung melakukan perubahan ke arah kemajuan demi mencapai kehidupan yang lebih baik.

G. Sekolah kita dalam perubahan paradigma pendidikan

Salah satu contoh yang mencerminkan pemikiran struktural-fungsionalisme yang dominan dalam bidang pendidikan pada masa lalu adalah *tracking system*, yakni sistem penelusuran kapasitas murid yang mengkategorikan para siswa menjadi kategori A, B, dan C. Kategori terbaik adalah kategori B, yakni para siswa yang memiliki nilai tinggi secara konsisten dalam matapelajaran ilmu pasti-alam. Kategori siswa ini dianggap superior atau pandai secara umum, karena diasumsikan bahwa mereka niscaya juga dengan mudah memahami bidang-bidang di luar ilmu pasti-alam seperti ekonomi, kesusasteraan, atau bahasa. Kategori kedua adalah kategori A, yakni para siswa yang dipandang sesuai (berbakat) untuk bidang seperti ekonomi dan geografi. Kategori ketiga adalah kategori C, yakni para siswa yang dianggap sesuai (berbakat) untuk bidang seperti sastra, sejarah, dan bahasa. Stereotip yang melekat pada kategori-kategori tersebut adalah bahwa kategori B terbaik, A sedang, dan C kurang. Penggolongan siswa semacam ini terjadi khususnya pada tahun 1950an hingga 1960an yang jelas sekali merupakan warisan sistem pendidikan kolonial Belanda.

Dalam praktek di sekolah para siswa yang secara konsisten memperoleh nilai tinggi dalam mata pelajaran ilmu pasti (matematika, fisika, dan biologi) dikategori sebagai murid yang pandai dan cerdas, dan mereka dimasukkan ke kelas B. Murid-murid yang lain dimasukkan ke kelas A atau C. Kesempatan untuk memilih jurusan pendidikan selanjutnya di masa yang akan datang lebih terbuka bagi murid-murid kelas B ketimbang kelas A dan C. Penggolongan tersebut terus berlangsung hingga kini, hanya namanya yang berubah-ubah. Pada tahun 1970an, untuk kasus SMA (sekarang SMU), penggolongan tersebut diberi nama Kelas Pasti-Alam (sebelumnya Kelas B), Kelas Sosial (sebelumnya Kelas A), dan Kelas Budaya (sebelumnya Kelas C). Kemudian semenjak tahun 1986 hingga kini, kita mengenal penamaan Kelas A1 (Kelas Ilmu Pasti), Kelas A2 (Kelas Ilmu Alamiah), Kelas A3 (Kelas Ilmu Sosial), dan Kelas A-4 (Kelas Ilmu Budaya), yang pada dasarnya memiliki basis berfikir dan stereotip yang sama dengan penggolongan sebelumnya.

Pendidikan dan institusi sekolah pada tingkatan mana pun kini berada dalam konteks perubahan paradigma. Sejak kini, sekolah harus mulai mengubah cara berfikir lama menjadi cara berfikir baru, yang meliputi hal-hal mendasar, antara lain:

- * Menghapus orientasi berfikir ke atas, ke pusat, dan sikap menunggu.
- * Mengembangkan sikap mental antisipatif dan inisiatif.
- * Mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan, hambatan, dan potensi yang dimilikinya.
- * Membangun kemampuan memenuhi kebutuhan dan mengatasi hambatan.
- * Membangun kemampuan mengelola potensi.
- * Membangun kemampuan guru secara individual sehingga kualitas kemampuan meningkat.
- * Membangun metodologi baru dalam menilai dan menggolong-golongkan siswa.
- * Membangun komunitas sekolah dan kemauan belajar bersama.

H. Memperkuat Dukungan Masyarakat Bagi Sekolah

1. *Jurang pemisah antara sekolah dan masyarakat*

Mungkin kita sudah memahami bersama bahwa interaksi antara sekolah dan masyarakat (khususnya para orang tua murid) sejak dahulu hingga kini, khususnya sekolah-sekolah negeri kita, masih sangat lemah dan terbatas. Barangkali satu-satunya interaksi terpenting adalah pertemuan sekolah dengan orang tua murid berkenaan dengan besar pungutan dana untuk kegiatan-kegiatan sekolah. Tak mengherankan apabila terdapat jurang pemisah antara sekolah dan masyarakat. Jurang pemisah tersebut terbentuk karena di satu pihak sekolah terikat dengan tugas dan tanggung jawab yang berorientasi ke atas (Pusat) yang terlepas dari kepentingan masyarakat, sedangkan di pihak lain, masyarakat telah menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab mendidik anak-anak kepada sekolah, dan berupaya menyediakan dana yang diminta sekolah.

2. *Memperkuat dukungan masyarakat*

Terkait dengan ciri-ciri perubahan sebagaimana dikemukakan di atas, jelaslah bahwa jurang pemisah antara sekolah dan masyarakat harus dihapuskan. Maksudnya, sejak sekarang, pada masa otonomi daerah yang berorientasi apresiatif terhadap potensi setempat, maka sekolah dan masyarakat ditempatkan dalam satu wadah yang tak terpisahkan satu sama lain. Di satu pihak sekolah harus mulai memandang masyarakat sebagai mitra belajar bersama, tidak hanya semata-mata sebagai sumber para siswa berasal. Proses belajar bersama tersebut diharapkan akan menghasilkan suatu bangunan kurikulum dan proses belajar-mengajar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagai contoh: seberapa besar relevansi kurikulum dan metode pengajaran dengan keluaran yang akan dihasilkan suatu sekolah yang dapat menjawab tantangan kebutuhan tenaga kerja dan mengurangi pengangguran lokal maupun regional.

Kita menyadari bahwa perubahan cara berfikir adalah persoalan yang tidak mudah dilakukan. Akan tetapi, setidaknya-tidaknya dalam simposium yang tengah kita selenggarakan ini gagasan menuju perubahan paradigma pendidikan tersebut mulai kita bicarakan. Namun, sekali perubahan tersebut terjadi, maka perubahan itu harus terjadi secara konsisten dan berkesinambungan.